

ABSTRAK

Muhammad Syahirul Alim : *Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Untuk Pembelian Bahan Bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya*

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah. Salah satu kegiatan usahanya yaitu melaksanakan pelayanan pembiayaan *murabahah*, dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah* untuk pembelian bahan bangunan di BPRS, dilaksanakan dalam satu transaksi diwaktu yang sama dengan *wakalah*, yaitu upaya pemberian kuasa pada nasabah untuk membeli bahan bangunan yang diinginkan secara mandiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *murabahah* dalam perbankan Syariah dimana objek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki dan dimiliki olehnya (bank). Yang diberikan penjual (bank) kepada pembeli (nasabah) bukanlah barang melainkan uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) proses pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 2) relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber ajaran hukum Islam (Syari'ah) adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana didalamnya mengatur konsep yang sangat jelas tentang prinsip muamalah khususnya mengatur tentang ekonomi yang sesuai dengan konsep syari'ah yang bertujuan terciptanya keadilan dalam masyarakat antara lain melalui penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Sumber data ada dua macam 1) sumber data primer, dari wawancara karyawan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 2) sumber data sekunder, dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku tentang muamalah, perbankan syariah, fatwa DSN dan artikel dari media elektronik.

Dari data yang diperoleh, diketahui akad *murabahah* dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*, barang yang diperjual belikan tidak jelas kepemilikannya, dimana barang secara prinsipnya belum menjadi milik bank dan nantinya akan langsung dipindahnama kepemilikan dari penjual pertama (supplier) langsung atas nama milik pembeli (nasabah). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembelian bahan bangunan ini batal demi hukum karena dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Jual beli seperti ini menjerumuskan kepada praktik riba terutama jual beli atas barang yang tidak ada dan gharar.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG